



Ringkasan pembahasan dan pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2018 di Parlemen Nasional

14 September 2018
Parlemen Nasional

Parlemen Nasional menggelar sidang umum paripurna pertama dan mengesahkan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2018 selama tiga hari antara 27 - 29 Agustus 2018. Sementara sidang paripurna tingkat spesialisasi berlangsung selama enam hari antara 31 Agustus - 7 September 2018. APBN 2018 sebesar US\$1.279,6 juta tersebut pada akhirnya disetujui dengan jumlah suara 42; mendukung, 9 menolak, dan 14 abstain.

Para anggota Parlemen yang memilih menolak dan abstain berasal dari Fraksi Fretilin, sementara fraksi oposisi dari Partai Demokrat (PD) dan Partai Persatuan Pembangunan Demokrat (PUDD) mendukung.

APBN dibagi menjadi tiga kategori

Kategori pertama mencakup periode pendanaan dari Januari hingga Juni 2018, yang dijalankan oleh Pemerintah Konstitusional VII, melalui anggaran perduabelas (*duodecimal*), dengan total anggaran US \$ 402.100 juta.

Kategori kedua berkaitan dengan periode pengeluaran dari Juli hingga Agustus 2018, di mana Pemerintah Konstitusional VIII memastikan pelaksanaan pembiayaan umum melalui anggaran perduabelas dengan total anggaran hampir US \$ 30 juta setiap bulan.

Kategori ketiga adalah dari September hingga Desember 2018, dengan perkiraan pengeluaran hingga akhir 2018, dengan total anggaran US \$ 715.500 juta.

APBN 2018, termasuk pinjaman, dengan rincian alokasi sebagai berikut:

1. Gaji dan upah: US \$ 200.312 juta;
2. Barang dan jasa: US \$ 421.666 juta;
3. Pembiayaan Umum: US \$ 261.925 juta;
4. Modal Kecil: US \$ 3.659 juta;
5. Modal dan Pembangunan: US \$ 392.037 juta (termasuk dana infrastruktur dan pinjaman).

Pembahasan dan sidang paripurna di tingkat spesialisasi

Sidang paripurna di tingkat spesialisasi adalah tahap dari proses pembahasan APBN setiap tahun sesuai dengan aturan prosedur Parlemen. Ini juga merupakan prosedur yang diterapkan untuk membahas rancangan undang-undang lainnya. Proses ini juga diterapkan untuk membahas setiap pasal dari undang-undang APBN yang diusulkan oleh Pemerintah kepada Parlemen untuk dibahas sebelum disetujui.

Selama proses pembahasan di tingkat spesialisasi dan pengesahan, JSMP mencatat

adanya 99 proposal yang diajukan. Proposal-proposal ini mencakup permintaan untuk penambahan alokasi anggaran dan proposal lain untuk mengurangi jumlah alokasi anggaran apabila para anggota Parlemen menganggap tidak perlu mengalokasikan dana yang terlalu besar yang tidak mungkin dijalankan dalam jangka pendek.

Ke-99 proposal ini terdiri dari 46 proposal dari fraksi-fraksi oposisi, 13 proposal dari fraksi AMP dan 34 proposal sebagai proposal yang diajukan bersama oleh oposisi dan fraksi AMP. Sementara itu ada 6 proposal baru yang diajukan pada saat pembahasan itu berlangsung.

Dari proposal-proposal tersebut, 20 ditolak, 26 proposal ditarik, 38 proposal disetujui dan 11 proposal yang telah disetujui melalui hasil pemungutan suara sebelumnya kemudian diubah.

Proposal yang ditarik berasal dari fraksi-fraksi oposisi. Proposal-proposal tersebut ditarik karena dua alasan. Alasan pertama karena mendapatkan penjelasan yang detail atau justifikasi dari Pemerintah, dan alasan kedua karena Pemerintah memberi lebih banyak pertimbangan terhadap proposal dari fraksi AMP. Perdana Menteri menegaskan bahwa Pemerintahnya harus lebih memprioritaskan usulan-usulan fraksi AMP karena jika tidak akan mengancam kelangsungan pemerintahannya.

Dari antara proposal yang diajukan oleh fraksi oposisi, proposal No. 87 terkait dengan layanan profesional, terutama kontrak untuk penasehat nasional dan internasional. Proposal ini diajukan bersama oleh fraksi FRETILIN dan PD. Dalam APBN 2018 mengalokasikan dana sebesar US \$ 1.786 juta untuk layanan profesional. Para anggota parlemen yang mengajukan proposal ini menjelaskan bahwa dalam APBN 2016, Pemerintah mengalokasikan dana sebesar US \$ 3.526 juta dan dalam APBN 2017 mengalokasikan dana US \$ 1.650 juta. Namun Parlemen Nasional tidak menerima informasi atau laporan tentang bagaimana dana tersebut digunakan untuk menyediakan layanan profesional ini.

Berdasarkan alasan tersebut, para anggota parlemen yang mengajukan proposal tersebut untuk mengurangi jumlah yang pada awalnya diusulkan sebesar US \$ 1.786 juta menjadi US \$ 786 ribu. Ini berarti Parlemen Nasional berhasil menghemat US \$ 1 juta. Proposal ini berhasil disetujui dengan melalui 37 suara mendukung, 3 menentang dan 23 suara abstain.

Dari proposal-proposal ini, alokasi tertinggi adalah proposal untuk TL Cement Ltd sebesar US \$ 50 juta. Proposal lainnya mencakup anggaran untuk membayar utang dari Kantor Kepresidenana, Departemen Keuangan, Kementerian Kehakiman, Kementerian Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Kementerian Luar Negeri dan Kerjasama, Kementerian Transportasi dan Komunikasi, Kementerian Perencanaan dan Investasi Strategis, Kantor Ombudsman untuk Hak Asasi Manusia dan Keadilan (PDHJ), Komisi Anti Korupsi (KAK) dan Laboratorium Nasional.

Khususnya di sektor peradilan, Parlemen Nasional mengesahkan dana sebesar US \$ 13.840 juta dengan jumlah 49 suara mendukung, 0 menentang, dan 15 abstain. Dari jumlah anggaran ini akan dialokasikan US \$ 4.700 juta untuk gaji dan upah, US \$ 9.089 juta untuk barang dan jasa dan remunerasi (pembayaran retroaktif) untuk para pengacara di kantor pembela umum.

Salah seorang Anggota Parlemen Carmelita Moniz selaku pemohon anggaran tambahan mengusulkan dua proposal tambahan anggaran sebanyak satu juta lebih untuk Bantuan Teknis Proyek Sistem Kadaster Nasional (SNC) yang kemudian disetujui. Anggaran tambahan ini juga akan digunakan untuk pembangunan kantor untuk pembela Umum di Kota Ermera dan Bobonaro.

Menteri Kehakiman menghargai niat baik anggota parlemen untuk mengesahkan anggaran untuk Kementerian Kehakiman guna mengembangkan sektor peradilan. Selanjutnya Menteri Keuangan menegaskan kembali bahwa sumber pendanaan untuk proposal ini bersumber dari dana KITAN karena terdapat sisa saldo US \$ 4 juta.

Proposal untuk menghilangkan alokasi anggaran sebagai berikut:

- Proposal untuk menghilangkan penggantian pajak eksplorasi KITAN sebesar US \$ 64.500 juta;
- Proposal untuk menghilangkan dana bergulir (anggaran multi-tahunan) untuk PSIK sebesar US \$ 5 juta.
- Dana cadangan di Departemen Keuangan.
- Serta alokasi Dana Pengembangan Sumberdaya Manusia (FDCH) untuk pengembangan kapasitas pegawai negeri.

Proposal yang disebutkan di atas bertujuan untuk mendukung proposal untuk penambahan anggaran ke Kantor Presiden Republik, Departemen Keuangan, Departemen Kehakiman, Departemen Pendidikan dan lembaga-lembaga otonom lainnya.

Keprihatinan dan kritik dari fraksi-fraksi Oposisi

Selama pembahasan di tingkat umum dan pembahasan di tingkat spesialisasi, anggota parlemen dari oposisi mengemukakan keprihatinan mereka bahwa RUU tentang APBN 2018 yang diajukan oleh Perdana Menteri tidak mematuhi prosedur yang ditetapkan dalam UU Pengelolaan Keuangan Negara. Pihak oposisi juga mengarisbawahi bahwa pelanggaran terhadap UU Pengelolaan Keuangan Negara tersebut tidak hanya dilanggar oleh Pemerintah tetapi juga oleh anggota Parlemen Nasional.

Pihak oposisi mengatakan bahwa tidak ada keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran, karena pendapatan jauh lebih kecil daripada pengeluaran. Dari perspektif ekonomi, APBN 2018 tidak realistis tetapi populis karena beberapa sektor/rubrik dari anggaran yang diajukan tidak diperlukan atau tidak relevan.

Partai-partai oposisi merasa prihatin karena pengeluaran dari Januari hingga Agustus 2018 hanya mencapai 29% dari total APBN 2018, sementara sebagian besar atau 71% dari anggaran yang dialokasikan akan dihabiskan hanya dalam waktu empat bulan.

Keprihatinan lain disampaikan adalah mengenai masalah proporsionalitas distribusi APBN Pemerintahan Konstitusional VIII yang tidak merata dan bertentangan dengan prioritas yang ditetapkan dalam programnya.

Partai-partai oposisi, pada khususnya Fretilin, sangat kecewa dengan alokasi anggaran untuk sektor pendidikan, pertanian dan kesehatan. Sektor-sektor ini merupakan sektor penting dan utama tetapi anggaran yang dialokasikan oleh Pemerintah sangat terbatas. Anggaran yang dialokasikan untuk sektor-sektor ini sebesar US \$ 121,1 juta atau hanya 9,4%. Dari jumlah ini pemerintah hanya mengalokasikan 5,9% untuk pendidikan dan jika demikian bagaimana dapat meningkatkan kualitas pendidikan.

Pihak oposisi juga mengidentifikasi beberapa pembayaran ilegal yang berkaitan dengan program pemberian makan di sekolah berdasarkan audit dari Pengadilan Audit pada tahun 2017 sebesar US \$ 28.000. Oleh karena itu, pihak oposisi meminta Perdana Menteri untuk secara hati-hati memeriksa masalah ini, untuk memastikan transparansi pelaksanaannya di masa depan. Selain itu, oposisi juga mempertanyakan proyek untuk pembangunan gedung sekolah karena setiap tahun pemerintah mengalokasikan dana tetapi masih belum ada hasilnya.

Fraksi partai PD juga menyatakan keprihatinan dan ketidakpuasannya dengan anggaran yang dialokasikan untuk 142 proyek dengan total anggaran sebesar US \$ 244,1 juta yang telah diselesaikan selama mandat Pemerintahan VI.

PD menolak proyek-proyek ini setelah menerima surat dari Direktur Sekretariat Proyek berskala Besar, pada 3 Agustus 2017. Surat ini menyatakan bahwa 142 proyek ini tidak termasuk dalam perencanaan anggaran dan belum disetujui oleh Parlemen dan dikategorikan sebagai proyek baru.

Direktur Sekretariat Proyek Utama mengakui bahwa Dewan Administrasi Pendanaan Infrastruktur (Conselho da Administração dos Fundos de Infraestrutura, CAFI) memberikan persetujuan untuk melaksanakan proyek-proyek ini, tetapi belum menandatangani kontrak dengan para pengusaha. Meskipun persetujuan telah diberikan oleh CAFI, tidak ada kontrak yang dibuat sesuai dengan Undang-Undang Pendanaan Infrastruktur, Undang-undang tentang Pengelolaan Keuangan Negara dan UU tentang APBN. Untuk alasan ini, PD meminta Perdana Menteri untuk memberikan klarifikasi atas keprihatinan yang diajukan oleh PD. Masalah-masalah dan keprihatinan ini termasuk:

1. Apakah anggaran US \$ 323,6 juta dialokasikan untuk kategori pembangunan untuk membayar 142 proyek?
2. Jika Pemerintahan Konstitusional VIII mengusulkan untuk mendanai proyek-proyek ini, maka proyek apa yang akan didanai dan seberapa besar jumlah uang yang disiapkan?

3. Bahkan Parlemen Nasional belum meralat APBN 2017 untuk memasukkan 142 proyek, dan oleh karena itu undang-undang mana yang memungkinkan Pemerintah VI mengizinkan pengusaha untuk melaksanakan proyek di lapangan, dan bagaimana mungkin Pemerintahan Konstitusional VIII sekarang meminta Parlemen Nasional untuk mengesahkan anggaran untuk membayar proyek-proyek ini?

4. Jika Pemerintahan Konstitusional VIII akan membayar 142 proyek tersebut, apa pendapat Perdana Menteri tentang legalitas dan konstitusionalitas 142 proyek? Apakah Perdana Menteri akan membayar proyek-proyek tanpa mempertimbangkan legalitas masalah ini?

5. Bagaimana dengan komitmen Perdana Menteri untuk mempromosikan pemerintahan yang baik, untuk memerangi kolusi dan korupsi, untuk menegakkan integritas para pemimpin dan meningkatkan kepercayaan masyarakat?

Selain itu, Fraksi Fretilin juga prihatin dengan kasus yang melibatkan Mantan Menteri Keuangan Emilia Pires. Anggota parlemen mendesak Pemerintahan Konstitusional VIII, dan khususnya Kementerian Luar Negeri khususnya, untuk bekerja sama dengan Pemerintah Portugis untuk membawa kembali terdakwa Emilia Pires untuk dihadapkan ke pengadilan di Timor-Leste.

Menanggapi keprihatinan ini, Menteri Kehakiman menyatakan bahwa kasus yang melibatkan Emilia Pires tidak dalam kompetensinya melainkan kompetensi pengadilan.

Menteri Luar Negeri dan Kerja Sama menyatakan bahwa kasus yang melibatkan Emilia Pires perlu ditangani dengan penuh kehati-hatian karena Emilia Pires saat ini memegang paspor Portugis.

Pernyataan politik dan pembentukan Komisi Penyelidikan Parlemen

Fraksi oposisi merasa bahwa ini adalah anggaran besar dan mereka meragukan kapasitas Pemerintah untuk menggunakan dana ini dengan benar dan tepat, terutama dalam hal pembayaran utang. Oleh karena itu mereka meminta Parlemen Nasional untuk membentuk sebuah Komisi Penyelidikan Parlemen (KIP) untuk memantau pembayaran utang atas 142 proyek yang direncanakan pemerintah untuk dibayar.

Sementara fraksi Pemerintah terus mendorong Pemerintah untuk disiplin dalam menggunakan anggaran tersebut. Anggota parlemen merekomendasikan ke Pemerintah untuk belajar dari pengalaman pelaksanaan anggaran di Wilayah Administratif Khusus Oecusse-Ambeno (RAEOA) dan Oecusse Ambeno dan Zona Khusus Atauro untuk Ekonomi Pasar Sosial (ZEEMS) di mana Pengadilan Audit menemukan bahwa ada banyak ketidakberesan dan ada proyek didanai melalui penunjukan langsung. Oleh karena itu anggota parlemen meminta agar hal ini dihindari untuk memastikan bahwa anggota Pemerintah menjalankan anggaran dengan benar.

Pemantaun JSMP

JSMP mengamati bahwa perdebatan tentang APBN 2018 berjalan dengan baik dari pembahasan di tingkat umum dan pembahasan di tingkat spesialisasi hingga pemilihan umum. Meskipun terdapat beberapa anggota parlemen yang tidak disiplin selama pembahasan dan proses pemungutan suara dan ada beberapa perbedaan antara anggota parlemen dari fraksi-fraksi oposisi dan fraksi Pemerintah.

Fraksi oposisi berpartisipasi aktif dalam perdebatan dan pembahasan termasuk mengusulkan 47 amandemen dari total 99 proposal. Meskipun banyak dari proposal ini ditarik karena mereka tidak mendapat dukungan dari mayoritas anggota Parlemen Nasional dan juga karena tanggapan atau justifikasi yang diberikan oleh Pemerintah cukup untuk membuat mereka kemudian menarik kembali usulannya. Selain itu, anggota parlemen dari oposisi juga menyatakan penyesalan mereka atas proposal yang tidak disahkan selama pemungutan suara.

Menanggapi keprihatinan ini Perdana Menteri menyatakan bahwa Pemerintah akan mempertahankan dukungannya untuk proposal yang diajukan oleh anggota parlemen AMP karena jika tidak akan ada risiko besar bagi Pemerintah yang dibentuk berdasarkan koalisi AMP hingga saat ini.

JSMP mengamati bahwa proposal APBN 2018 bertujuan untuk menormalkan proses anggaran dan menghentikan proses anggaran duadesimal (perduabelasan). Prioritas utama dari APBN 2018 adalah untuk membayar utang dan untuk memfasilitasi roda pemerintahan yang selama beberapa bulan karena tidak ada proyek baru dalam APBN 2018 yang diusulkan oleh Pemerintahan Konstitusional VIII.

Namun, JSMP percaya bahwa demi kepentingan nasional dan untuk mempromosikan partisipasi dari fraksi-fraksi oposisi, pemerintah dan anggota parlemen dari fraksi-fraksi Pemerintah harus terbuka untuk mempertimbangkan proposal dari partai-partai oposisi. Ini berarti bahwa mereka perlu menghargai proposal tertentu dari partai oposisi untuk berkontribusi dalam meningkatkan dan memperkuat kerja pemerintah dan Negara pada umumnya. Pertimbangan proposal ini juga akan berkontribusi dalam membangun iklim politik yang aman dan kondusif di Parlemen Nasional sekarang dan di masa depan.

JSMP juga mencatat bahwa proposal dan kekhawatiran yang dibuat oleh fraksi-fraksi oposisi juga relevan dan penting bagi pertimbangan pemerintah untuk memastikan tata kelola pemerintahan yang proporsional, dengan menghormati norma-norma yang ditetapkan dalam Undang-undang Pengelolaan Keuangan Negara dan Undang-Undang mengenai APBN dan undang-undang lain yang terkait dengan penggunaan APBN untuk memastikan Pemerintah yang kredibel di masa depan.

JSMP percaya bahwa jika setiap orang berpartisipasi, terutama partai-partai politik di Parlemen Nasional, ini akan berdampak baik pada rakyat dan bangsa Timor-Leste.

Untuk informasi lebih lanjut silahkan hubungi:

Luis de Oliveira Sampaio
Direktur Eksekutif JSMP
Email: luis@jsmp.tl
www.jsmp.tl
Telepon: 3323883 | 77295795